

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

TERHADAP

RANCANGAN QANUN ACEH

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Hamdan wa syukran lillah, shalatan washalaman 'ala Rasulillah, wa 'ala alihi washahbihi wamawwalah.

Yang kami hormati

Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh;

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRA;

Sdr. Gubernur Aceh;

Sdr. Panglima Kodam Iskandar Muda;

Sdr. Kapolda Aceh;

Sdr. Kajati Aceh;

Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pimpinan Instansi Vertikall lainnya;

Sdr. Sekretaris Daerah Aceh, Para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur; Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, dan Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh;

Sdr. Insan Pers, LSM, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Paguyuban, Mahasiswa, dan dari Dunia Usaha;

Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2020 dalam rangka **Pembahasan RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021**.

Shalawat dan salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mewariskan Al Qur'an dan Sunnahnya sebagai Petunjuk bagi sekalian ummatnya.

Sidang dewan yang terhormat,

Sebelumnya izinkan kami memberikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beserta Tenaga Ahli dan Staf Pendamping dalam pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021, dengan harapan besar, Rancangan Qanun ini segera dapat disahkan, menjadi Qanun Aceh yang sama-sama kita harapkan dapat menjadi suatu landasan hukum yang representatif dalam penerapannya, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Walaupun kita menghadapi dalam situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini, namun berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penetapan rancangan Perda (Qanun) APBD (APBA/APBK) paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun atau pada tanggal 30 November. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Aceh serta Badan Anggaran DPR Aceh telah berupaya untuk membahas anggaran tepat waktu dalam upaya mempercepat proses pembangunan.

Pada dasarnya *Entry point* pembangunan Aceh dari perencanaan dan pengganggaran, jika terjadi keterlambatan, maka dapat dipastikan pembangunan Aceh di semua sektor akan terhambat dan merugikan masyarakat. Semoga saja pengesahan APBA Tahun Anggaran 2021 dapat mempercepat realisasi anggaran, bukan hanya cepat pengesahan akan tetapi waktu realisasi anggaran juga dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2021.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita sudah berusaha pembahasan anggaran untuk tepat waktu, namun beberapa hal yang saat ini masih terjadi yang perlu perhatian kita semua. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman yang telah membahayakan bukan hanya dalam bidang perekonomian Nasional dan stabilitas sistem keuangan yang memberikan pengaruh terhadap keuangan daerah, namun telah berdampak pada semua sektor dan bidang. Di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda, telah memberikan dampak timbulnya persoalan baru terhadap pembangunan Aceh yang sedang berjalan setelah konflik dan tsunami 15 tahun yang lalu. Kita sedih, Aceh di bawah Papua dalam perolehan kejuaraan MTO Nasional di Padang dalam tahun ini, hati kita juga bikin teriris setiap hari kita membaca berita tentang kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak. Aceh saat ini sedang krisis moral, nilai religius dan spritualitas sebagai umat Islam mulai terkikis karena pengaruh global dan tehnologi. Perubahan karakter dan akhlak yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam telah bergeser menjadi prilaku yang amoral dan asusila. Selain itu penggunaan tehnologi gadget yang salah kaprah menjadi persoalan baru telah mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Situs-situs porno yang dapat diakses dengan mudah karena lemahnya pengawasan para pihak, ditengarai sebagai sebab anak-anak melakukan kekerasan terhadap sesamanya, begitu juga yang dilakukan oleh yang sudah akil balighpun melakukan hal yang sama.

Aceh sebagai daerah darurat Narkoba, Narkoba salah satu pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Aceh. Rendahnya dan semakin terkikisnya rasa kepedulian dan kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar terutama yang dialami kelompok rentan perempuan dan anak. Masyarakat Aceh yang dulunya memiliki jiwa gotong royong, saling membantu dan peka terhadap sosial di lingkungannya, kini sudah mulai berkurang, bahkan kehidupan masyarakat Aceh saat ini cenderung individualisme, sehingga mengurangi rasa kepedulian terhadap sesama

makhluk sosial. sementara di sisi yang lain kita adalah daerah Serambi Mekkah dengan menerapkan Syariat Islam. Ini beberapa persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian kita, sehingga pembangunan Aceh ke depan dapat diarahkan untuk dapat mengurangi persoalan atau mencari solusi terhadap masalah ini sehingga dapat terwujudnya Aceh Meuadab dan Mulia.

Sidang dewan yang terhormat,

Fraksi Partai Gerindra sangat berharap alokasi anggaran dalam APBA Tahun Anggaran 2021 harus kembali ke pelayanan dasar sesuai dengan kewenangannya untuk mencapai visi dan misi serta prioritas pembangunan Aceh pada tahun ke IV dari Periode RPJMA tahun 2017-2022 dengan 4 (empat) Prioritas RKPA yaitu :

- 1). Mendorong Pemulihan Agroindustri dan Pemberdayaan UMKM;
- 2). Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
- 3). Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan; dan
- 4). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Ke empat prioritas tersebut harus singkron dengan tema "Mengembangkan Pembangunan pada tahun 2021 yaitu industri pengolahan yang didukung oleh peningkatan daya saing SDM dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas". Unggulan Aceh Hebat yang terkait dengan tema pembangunan Tahun 2021 adalah Aceh Meuadab, Aceh Pemulia, Aceh Seujahtra, Aceh Kreatif, Aceh Carong, Aceh Teuga, Aceh Meugoe dan Meulaot, Aceh Kaya sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen RPJM Aceh Tahun 2017-2022.

Seharusnya kebijakan keuangan Aceh disusun dengan didahului pentingnya analisis sosial untuk menilai apakah sebuah APBA sudah berkeadilan atau belum? Apakah APBA sudah mengakomodasi kepentingan orang miskin? Apakah APBA sudah meletakkan kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara? Sehingga Realitas penyusunan kebijakan anggaran netral dengan menggunakan perspektif keberpihakan, bukan hanya bagi-bagi dana yang tidak seimbang. Dengan anggaran banyak, tapi minim manfaat dan tidak tercapainya target setiap tahunnya untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022. Hal ini penting dilakukan agar tingkat konsentrasi dan konsistensi, maupun capaian kebijakan anggaran setiap tahun dapat diukur hasilnya. Kebijakan

program pembangunan dan kebijakan anggarannya yang memiliki derajat konsistensi yang tinggi akan mencerminkan konsentrasi alokasi sumberdaya terhadap permasalahan strategis dalam pembangunan Aceh. Seharusnya menjadi dasar yang harus dilihat setiap tahun penyusunan APBA, bukan hanya sekedar pemenuhan peraturan dan apalagi pemenuhan kepentingan kelompok tertentu saja. Pemerintah Aceh juga harus memiliki strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan mengatur Anggaran Belanja yang efektif dan efesien untuk mengatasi adanya penurunan dana transfer dari Pemerintah untuk Provinsi dan Kabupaten di Indonesia dan menghadapi situasi pandemi covid-19.

Sidang Dewan Yang terhormat

Beberapa hal pandangan kami yang perlu kami sampaikan dalam sidang paripurna ini untuk menjadi perhatian kita semua dalam upaya mencapai pembangunan Aceh sebagai berikut;

1. Indikator Pembangunan Aceh

Berdasarkan data BPS tahun 2020, saat ini apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Aceh masih tinggi tingkat kemiskinan, meskipun menurut rilis BPS tahun 2020 bukan lagi berada nomor satu terbawah di Sumatera. Pada Maret 2020, penduduk miskin Aceh 14,99 % menurun 0,02 % dari 15,01 % pada tahun 2019. Angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera (9,82 %) dan Nasional (9,22%). Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2019 sebesar 810 ribu jiwa (15,01 %), sementara pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 819 ribu Jiwa (15,32 %), terjadi penambahan Penambahan peenduduk miskin sejumlah 9 ribu orang.

Indek Pembangunan Manusia pada tahun 2019 di Aceh 71,90 Persen sementara Nasional berada pada 71,92 Persen. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kaya sumber daya hayati dan sumber daya alam non hayati harusnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun pertumbuhan ekonomi Aceh sangat lambat, berdasarkan Laporan Bank Indonesia Perekonomian Aceh pada Periode Mei tahun 2020, secara nominal, pendapatan pada triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp.7,46 triliun atau berhasil tumbuh 6,00%, dimana secara

pertumbuhan nominal lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu tumbuh 11,97%, pada nominal Rp.7,04 trilyun.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

2.1. Pendapatan Aceh

Ketergantungan Pemerintah terhadap transfer Aceh dari pemerintah pusat tergambar dari derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kecilnya proporsi Pendapatan Asli Aceh dalam struktur **APBA** telah pendapatan yang direalisasikan sebesar Rp. 2.078.774.970.956,92,- dari Realisasi sementara Pendapatan Aceh sampai dengan tanggal 19 November 2020 telah mencapai Rp.11.514.237.212.581.90,- atau dengan capaian sebesar 82,21%. Dari total realisasi PAD, sumber pendapatan utama berasal dari Pajak Daerah, hal ini belum sebanding dengan potensi kekayaan alam Aceh. Sementara masih banyak potensi lain untuk penambahan Pendapatan Asli Aceh belum dimanfaatkan dan dieksploitasi.

Untuk Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Aceh direncanakan sebesar Rp. 14.183.394.212.942,-, dengan pendapatan yang paling tinggi bersumber dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Bagi Hasil pada RAPBA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 11.754.301.755.400,.

Oleh karena itu Keberadaan BPMA, PT PEMA dan BPKS serta penetapan Kawan Industri Aceh (KIA) Ladong, KEK Arun serta keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mengambil alih Pengelolaan Minyak dan Gas Blok B Aceh Utara serta pengembangan industri kreatif dan wisata merupakan sumber potensi penting bagi pertumbuhan ekonomi Aceh harus serius dalam pengelolaan yang professional dan menghasilkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh yang pada akhirnya tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Aceh.

2.2. Belanja Aceh

Mencermati Realisasi sementara belanja sampai dengan 19 November 2020 mencapai Rp. 8.584.107.864.042,44,- atau 54,23% dari anggaran Belanja sebesar Rp.15.827.709.393.003,00,- Tahun Anggaran 2020, ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Aceh untuk lebih realistis dalam perencanaan dan penganggaran walaupun dengan alasan pandemi saat ini, disisi lain dalam Nota Keuangan APBA disebutkan permasalahan utama dalam Belanja Aceh adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan belanja.

Sementara itu jumlah Belanja dalam RAPBA Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 16.990.469.972.136,sangat penting memperhatikan kesanggupan dan kemampuan serta mendorong kinerja SKPA dalam mengimplementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan serta efektif di mulai awal tahun anggaran berjalan. Pemanfaatan Belanja Aceh betul-betul harus efektif untuk mencapai sasaran, ditengah kita belum mandiri dalam menopang belanja publik, dana belanja masih didominasi oleh penerimaan penvediaan pendapatan transfer pemerintah pusat.

Dilihat dari rencana pendapatan sebesar Rp.14.183.394.212.942,-, dengan rencana Belanja Rp. 16.990.469.972.136,-, APBA TA 2021 akan mengalami defisit, meskipun disebutkan akan ditutupi dari SiLpa tahun sebelumnya, oleh karena itu perlu upaya untuk efisiensi penggunaan Belanja Aceh sehingga ada keseimbangan antara Pendapatan dengan Belanja.

Melihat komposisi alokasi Anggaran pada rancangan Qanun APBA tahun anggaran 2021, kami melihat ada alokasi anggaran tersebut telah dengan program dan kegiatan berdasarkan nomenklatur Kemendagri, namun kami belum melihat secara specifik progam dan kegiatan inovasi dalam usaha melakukan perbaikan kualitas pelayanan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam situasi Covid-19 berkelanjutan atau Covid-19 sudah berlalu. Kami menyarankan perlunya perimbangan anggaran pembangunan dan percepatan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini menyangkut dengan pemberdayaan ekonomi, dimana SKPA-SKPA yang bersentuhan langsung dengan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga harus menjadi prioritas.

2.3. Urusan Pemerintahan

Dari banyak urusan pemerintahan, hanya beberapa urusan yang sangat menjadi perhatian kami, sehingga perlu menyampaikan dalam Sidang paripurna ini antara lain;

2.3.1. Pendidikan

Sehubungan dengan Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global dan Aceh, sangat berdampak pada urusan pendidikan, situasi seperti Pemerintah khususnya Pemerintah Aceh seharusnya memiliki inovasi dan strategi dalam upaya mempertahankan mutu pendidikan di saat pandemi seperti ini, tidak membiarkan guru dan siswa untuk mencari solusi sendiri menghadapi situasi rumit seperti dalam ini. Karena kami mempertanyakan strategi dan langkah-langkah Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan program prioritas apa yang dilakukan dalam situasi saat ini.

Dengan alokasi anggaran yang lumayan besar pada SKPA kita berharap meningkat pula mutu anak-anak didik, saran kami kepada saudara Gubernur untuk memastikan kesanggupan orang tua peserta didik terhadap biaya pendidikan, sehingga perlu menetapkan standar biaya pendidikan untuk satuan pendidikan di bawah kewenangan Gubernur. Selain itu perlu adanya rancangan kebijakan dalam urusan mengalokasikan Anggaran untuk melahirkan intelektual pendidikan bermoral, jangan hanya mengejar kuantitas semata lalu dijadikan etalase opini media tapi kemudian kita lupa membentuk karakter, memiliki moral yang tinggi, berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah lain tingkat Nasional dan Internasional. Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2021 untuk membentuk sumber daya profesionalisme, kami mengingatkan kembali untuk Pemerintah Aceh lebih memperhatikan pendidikan vokasi sehingga memiliki kemampuan *soft skill* dan *hard skill* dan terampil dalam bekerja untuk mengatasi pengangguran, mempercepat pertumbuhan menambah pendapatan percapita masyarakat serta yang terpenting jangan sampai "Buya krueng teudoeng-doeng, Buya tameng meuraseuki", karena ketidakberdayaan masyarakat kita terutama kalangan pemuda.

2.3.2. Urusan kesehatan

Ditengah Pandemi Covid-19 yang terus menghantui kehidupan masyarakat tentunya penempatan anggaran yang besar pada urusan kesehatan dapat kita maklumi, namun demikian agar anggaran tepat sasaran perlu pengawasan ketat, agar efektif dan efesien dimanfaat sebaik mungkin dalam upaya preventif dan edukatif bidang kesehatan. Perlu dipertimbangkan dalam penempatan pejabat strategis di bidang kesehatan yang siap dan siaga kedaruratan. Selain itu perlu juga meningkatkan kualitas, profesionalitas dan kesiapsiagaan para tenaga medis agar tidak paranoid dengan Covid-19, berikan insentif yang cukup bagi tenaga medis dan memenuhi kebutuhan serta sarana alat pelindung diri (APD). Perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan perhatian yang intensif, serta menfasilitasi jalannya koordinasi antara Satgas Covid dengan petugas kesehatan. Kami menemukan dilapangan, bahwa koordinasi dan komunikasi antara mereka masih jauh dari harapan, sehingga sering terjadi saling menyalahkan.

Angka stunting yang sangat tinggi di Aceh, juga tidak luput dari perhatian kita, karena itu Pemerintah Aceh harus memiki langkah dan strategi, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, kebutuhan pangan dan gizi menjadi sangat penting untuk diperhatikan, memastikan ibu hamil dan balita sehat dan terlayani dengan baik serta sanitasi yang sehat di lingkungan keluarga.

2.3.3. Urusan Sosial

Dalam situasi pandemi seperti ini, Pemerintah Aceh perlu memastikan jaminan sosial bagi masyarakat rentan, terutama kelompok difabel dan anak-anak terlantar, apakah semua sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga tidak ada masyarakat rentan yang terlantarkan.

2.3.4. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat yang seharusnya tidak terjadi di Nanggroe Syariat Islam dan Serambi Mekkah. Apalagi kondisi Aceh saat ini sedang dihadapkan pada tingginya kasus covid-19. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Aceh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dari tahun 2018 hingga tahun 2020 meningkatkan tajam. Kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1.335 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 1.424 kasus selama rentang waktu Tahun 2018-2020. Kasus Kekerasan Perempuan 146 Kasus dan Kekerasan Tahun 2020 terhadap anak 170 Kasus. Dengan bentuk kekerasan KDRT, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Penelantaran, Pemerkosaan, Pelecehan Seksual, Traffiking, Ekploitasi Seksual, Eksploitasi Ekonomi dan lainnya. Kondisi Aceh saat ini menunjukan tingginya angka kekerasan perempuan dan anak, suatu situasi yang dapat dikatakan "darurat" yang perlu segera disikapi.

2.3.5. Tenaga Kerja

Pemerintah Aceh harus lebih ketat dalam pengawasan terhadap pekerja Warga Negara Asing di Aceh dan perlu pengawasan lebih ketat terhadap eksplorasi hasil bumi Aceh yang tidak memiliki perizinan, begitu juga pengawasan terhadap rentenir luar daerah yang masuk ke Aceh melalui pinjaman tidak jelas, sehingga telah meresahkan masyarakat.

2.3.6. Pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata

Sektor ril dalam peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Aceh adalah Bidang Pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. Pemerintah Aceh tidak perhatian pada sektor ini hanya pada penyediaan dan ketahanan pangan, akan tetapi fokus kembali upaya untuk target pasar dari hasil potensi yang ada. Covid-19 telah memberikan dampak besar terhadap akses marketing atau pasar seperti kopi, kakau, melinjau serta usaha wisata dan lainnya karena daya beli dan jumlah kunjungan yang menurun. Pemerintah Aceh harus dapat menfasilitasi kembali akses pasar dan akses transportasi yang mudah untuk ini.

Pada sisi yang lain, saat pandemi seperti ini, sektor ini merupakan sektor yang paling unggul, sehingga perlu diperkuat dan diberdayakan. Aceh seharusnya konsentrasi dan fokus memperkuat sektor yang bersifat komparatif dengan potensi yang tersedia sebagai basis dalam pertumbuhan ekonomi di Aceh. Meskipun saat ini ada subsidi untuk UMKM, tapi untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan bahkan kelautan serta

pariwisata dalam upaya pemulihan ekonomi harus lebih maksimal lagi dilakukan beriringan dengan penanganan Covid-19

2.3.7. Pertambangan

Dalam hal pertambangan, yang menjadi perhatian kami adalah pertambangan emas. Aceh memiliki potensi emas yang saat ini telah menjadi ladang perebutan semua pihak, banyak toke penambang emas sayangnya bukan penduduk lokal dan yang pekerjapun banyak pendatang dari luar Aceh. Penambangan emas dengan tidak memperhatikan kerusakan alam karena menggunakan alat berat, Pemerintah Aceh perlu kembali untuk menata dan mengelola serta memperhatikan perizinan dan menertibkan bagi penambang emas illegal, ini perlu sikap yang arif dan bijak dari Pemerintah Aceh.

2.3.8. Syariat Islam

Salah satu misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Aceh meuadab dan mulia, hari ini moralitas anak bangsa sedang dipertaruhkan, di saat orang tua sibuk berperan menjadi guru bagi anaknya dan harus menyediakan hanphone sebagai media untuk anak belajar daring, ternyata ditemukan banyak anak yang sibuk dengan game bahkan terlibat judi online, lebih parah lagi sebagai pemicu dalam melakukan kekerasan seksual dan praktek prostitusi anak di bawah umur. Selain itu pengawasan yang kurang sehingga munculnya kasus baru adanya yang pindah agama, Nauzubillahi minzalik. Ini akibat lemahnya kontrol sosial dan pengawasan terhadap pengamalan nilai-nilai syariat islam meskipun disinyalir karena faktor ekonomi.

2.3.9. Reformasi Birokrasi

Sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur saat mencalonkan diri jadi kepala daerah, dimana reformasi birokrasi merupakan salah satu poin penting yang disampaikan pada sidang paripurna DPR Aceh. Untuk itu perlu segera direalisasikan, karena reformasi birokrasi dapat diukur dan tercermin dari kepatuhan, kedisiplinan dan menurunnya angka pelanggaran etik/moralitas ASN, dan terpenting menghilangkan budaya KKN disetiap jenjang birokrasi, kami berharap sudah saatnya kita menghentikan para

oknum, siapapun baik dari dalam birokrat maupun dari pihak lain yang hanya menjadi kolaborator dan fasilitator yang hanya ingin menikmati "kue" APBA. Saran kami dalam hal mengangkat dan mutasi pejabat atau pimpinan lembaga otonom, Tenaga Ahli dan lain lain harus lebih arif dan bijaksana sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan kapabilitas, kapasitas dan kemampuan keahlian sehingga dapat mencapai target kinerja dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan terhadap apa yang telah disampaikan di atas, Fraksi kami, Fraksi Partai Gerindra memberikkan pendapat, usul dan saran atas Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut;

- 1. Pemerintah Aceh harus konsentrasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Aceh dari berbagai potensi baik sumber daya alam, zakat dan sumber lainnya, mengurangi ketergantungan fiskal dengan pusat, sehingga harapan kemandirian dapat tercapai.
- 2. Pemerintah Aceh harus fokus untuk menyusun program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit dalam pencapaian target kinerja Daerah dan Utama dengan anggaran realistis sehingga dapat dilaksanakan atau direalisasikan sesuai dengan rencana.
- 3. Pemerintah Aceh harus memperhatikan anggaran pendidikan untuk kebutuhan pendidik dan peserta didik dalam menghadapi pandemi. Juga perlu menetapkan standar biaya sesuai dengan kemampuan peserta didik sehingga memastikan kesanggupan orang tua untuk melanjutkan sekolah anaknya terutama satuan pendidikan di bawah kewenangan Gubernur, jangan sampai lembaga pendidikan dijadikan ladang bisnis baru sehingga anak-anak tidak dapat mengakses dengan merata pendidikan mereka.
- 4. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, Pemerintah Aceh harus memperhatikan kesejahteraan/insentif tenaga medis dan alat pelindung bagi tenaga medis di wilayah pedalaman dan terpencil.

Masih banyak dokter, tenaga medis dan bidan yang belum memperoleh alat pelindung diri dalam situasi pandemi.

Mengurangi angka stunting, thalasemia, kanker, diabetes selain covid-19, sebagai ancaman bagi generasi masa depan Aceh dan harus diupayakan untuk meningkatkan angka harapan hidup.

- 5. Pemerintah Aceh harus fokus dalam upaya pemberdayaan ekonomi sebagai babak baru dalam situasi pandemi. Kami memahami di tengah Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi postur dan pengalokasian anggaran, terutama pada urusan kesehatan, namun disisi lain perputaran ekonomi di masyarakat juga perlu menjadi perhatian, karena bila masyarakat tidak produktif maka akan mengurangi pula sektor penerimaan pajak, rendahnya pendapatan menambah rendahnya kontribusi PDRB dan percapita, angka penganguran.
- 6. Pemerintah Aceh untuk memperhatikan, membantu usaha mikro masyarakat seperti *home industry*, marketingnya dan sektor jasa lainnya, kiranya pemerintah perlu mendata ulang keberadaan usaha usaha mikro masyarakat yang terdampak covid, melakukan pembinaan serta pengawasan secara intensif, mandiri dan berkelanjutan. Agar bantuan pemerintah tidak sia-sia serta penggunaannya tepat sasaran yang selama ini kami melihat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah masih sangat kurang.
- 7. Perlunya Pemerintah Aceh menfasilitasi pelaku usaha perbankan yang beroperasi di Aceh untuk musyarawarah dan merumuskan peran mereka di dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi mikro dan ekonomi kreatif. Selama ini perbankan lebih menjalankan program bersifat nasional dan alokasi CSR belum mampu mendongkrak usaha mikro ekonomi dan ekonomi kreatif. Sangat penting mengingat perbankan di Aceh semestinya proaktif, mempermudah akses permodalan dan menfasilitasi akses pasar dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh harus berusaha agar produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk luar.
- 8. Pemerintah Aceh perlu menjamin kenyamanan dan keamanan serta iklim usaha yang kondusif berinvestasi dan menerapkan sistem yang

bukan bersifat taktis, dimana pelibatan pelaku ekonomi lokal harus menjadi poin penting didalam setiap klausul perjanjian dengan calon investor. Begitu juga perlu menindaklanjuti rencana kerjasama dengan Negara lain atau daerah lain seperti dengan Andaman India.

- 9. Pemerintah Aceh mengupayakan memberikan stimulus modal, menguatkan dan memberdayakan masyarakat dan dunia usaha Agro industry dan mengembangkan UMKM pada sektor ril pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan parawisata mulai dari hulu sampai kepada hilirnya, mulai akses modal, perencanaan bisnis, akses pasar sampai pada memastikan adanya keuntungan dan nilai pertumbuhan ekonomi.
- 10. Dalam upaya peningkatan pelayanan pelaksanaan Syariat Islam dan membentuk sumber daya manusia yang baik, maka program dan kegiatan perlu diarahkan untuk memperbaiki moral dan karakter masyarakat mulai anak-anak sampai orang tua, karena selama ini sudah terjadi prilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Islam dan tingginya pelanggaran syariat islam.
- 11. Menguatkan peran aparatur gampong untuk lebih mawas dan memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mendeteksi secara dini kejahatan dan perilaku yang menyimpang di gampong, mari mengajak kembali untuk "pageu gampong" sebagai upaya perlindungan dan kenyamanan bagi warga masyarakat dari tindakan apapun yang menyimpang.
- 12. Memperketat pengawasan terhadap masyarakat di perbatasan Aceh dalam pengamalan nilai-nilai Islam, meningkatkan pengawasan dalam jaringan Narkoba, mengawasi dan melindungi masyarakat dari rentenir luar yang melakukan operasi dan transaksi keuangan illegal di Aceh, mempertahankan keberlanjutan perdamaian di Aceh.

Tahun Berkenaan

Sidang dewan yang terhormat,

Badan Anggaran DPR Aceh telah menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2021, maka Fraksi Partai Gerindra sangat sependapat dan setuju terhadap pendapat yang telah disampaikan Badan Anggaran DPR Aceh dalam sidang paripurna.

Akhirnya seraya berserah diri kepada Allah SWT, Fraksi kami, fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim menyatakan menerima Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Aceh b. Belanja Aceh	Rp. 14.183.394.212.942,- Rp. 16.990.469.972.136,-
Defisit/surplus	Rp. (2.807.075.759.194,-)
c. Pembiayaan Aceh	
1. Penerimaan	Rp. 2.887.075.759.194,-
2. Pengeluaran	Rp. 80.000.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 2.807.075.759.194,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	

Rp.

0,-

Demikian pendapat, usul dan saran Fraksi Partai Gerindra DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2021, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan agar pembangunan Aceh benar-benar akan dapat mensejahterakan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Apabila dalam penyampaian pendapat, usul dan saran ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Banda Aceh, 12 Rabiul Akhir 1442 H / 28 November 2020 M.

FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Ketua,

Drs. H. Abdurrahman Ahmad

1. Safaruddin, S.Sos, M.S.P	Penasehat
2. Drs. H. Abdurrahman Ahmad	Ketua
3. Drs. H. Asib Amin	Wakil Ketua
4. H. Jauhari Amin, SH, MH	Sekretaris
5. Kartini Ibrahim, SE	Bendahara
6. H. Ridwan Yunus	Anggota
7. Khairil Syahrial, ST. M.A.P	Anggota
8. Drs. H. Taufik, MM	Anggota